

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini semakin banyak muncul masalah dalam bidang muamalah. Dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masalahpun semakin kompleks, khususnya dalam bidang fiqhiyah. Untuk menyikapi kondisi yang seperti ini, kita dituntut untuk dapat berfikir secara logis serta tetap konsisten memegang teguh dasar-dasar agama Islam.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, juga senantiasa terlibat dalam akad atau hubungan muamalah. Praktek muamalah yang sering dilakukan diantaranya jual beli, pinjam meminjam, utang-piutang sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Dalam menjalankan praktek muamalah kita tak hanya menggunakan rasio akal tapi juga tetap berpegang pada Al-Qur'an dan hadits sebagai dasarnya.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, Muhammad Yusup Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan muamalah dalam arti sempit (khas) menurut Hudlari Byk, ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. (Hendi Suhendi, 2002: 2)

Salah satu bagian dari fiqih muamalah adalah gadai (*rahn*), secara umum gadai (*rahn*) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apayang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*). (Rachmat Syafei', 2001: 160)

Sesuai kaidah:

لا يتم التبرع إلا بالقبض

“Tidak sempurna akad *tabarru*’ kecuali dengan penyerahan barang”.

Akad *tabarru* adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan (A. Djajuli, 2006: 135).

Apabila seseorang ingin berutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada dibawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sebagai jaminan sampai ia melunasi hutangnya. Pemilik barang yang berhutang disebut *Rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya dibawah kekuasaannya disebut *Murtahin*. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah *Rahn* (gadaian). Pihak *rahin* (orang yang



Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah

tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Soenarjo dkk, 1992: 70)

Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Salah satu contoh keseharian dalam kehidupan bermasyarakat terjadi berbagai macam fenomena, salah satunya yaitu, ketika mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi hal ini tidak semudah yang dibayangkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kadang harus bekerja pada orang lain sebagai pengelola lahan pertanian milik orang lain dengan pembayaran sejumlah uang sebagai gantinya, ini adalah bentuk suatu

kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka yang belum mengenal arti akan hukum positif kita.

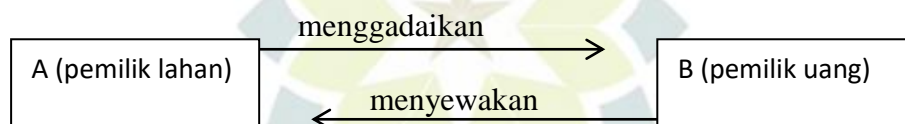
Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat, yaitu:

1. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti **bagi hasil**;
2. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai;
3. Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.

Umumnya perjanjian dilakukan secara tertulis antara kedua pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan menyebutkan masa gadainya yaitu selama 4 musim (2 tahun). Dan yang menjadi persoalan dalam sistem gadai sawah ini adalah petani (pemilik lahan) akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan lahan pertanian tersebut digarap oleh pemilik uang. Sistem gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada pemilik uang.

Gadai (rahn) dalam konsep fiqih muamalah bahwasanya lahan pertanian yang digadaikan kepada pemilik uang status kepemilikannya tetap berada pada pemilik lahan, hal ini berimplikasi mengenai biaya perawatan dan manfaat barang gadai yang pada prinsipnya para fuqaha telah berpendapat bahwasanya segala resiko atas biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab pemilik lahan, bukan tanggung jawab penerima gadai, karenanya setiap manfaat atau keuntungan yang dihasilkannya menjadi hak pemiliknya.

Fakta yang terjadi dimasyarakat saat ini, bahwasanya lahan pertanian yang digadaikan oleh pemilik lahan kepada pemilik uang tentu digarap oleh pemilik uang karena bukan saja untuk memperteguh rasa percaya melainkan untuk mencari keuntungan, jika pemilik lahan ingin menggarap lahan itu, pemilik lahan harus menyewanya sedangkan alasan orang yang menggadaikan menyewa kembali karena mereka ingin berusaha dengan cara mengelola lahan pertaniannya agar mendapatkan hasil yang maksimal, namun dalam kehidupan bermasyarakat timbul rasa gengsi, jika lahan pertanian yang digadaikan digarap oleh pemilik uang, maka pemilik lahan menyewa kembali lahan tersebut seperti dalam skema :



Hal yang demikian bisa menguntungkan dan merugikan salah satu pihak, pemilik uang bisa mendapatkan keuntungan dari pembayaran uang sewa dan pengembalian uang gadai, sedangkan pemilik lahan tentu harus mengembalikan uang gadaian ketika masa gadai itu sudah berakhir, dan membayar uang sewa sebelum menggarap lahan pertanian.

Setelah melihat permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam masalah tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN SEWA–MENYEWA PADA LAHAN PERTANIAN YANG DIGADAIKAN DI DESA PINANGSARI KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang Melatar belakanginya Terjadinya Sewa-menyewa Pada Lahan Pertanian yang Digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Sewa-menyewa Pada Lahan Pertanian yang Digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-menyewa Pada Lahan Pertanian yang Digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakanginya terjadinya sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat yang berguna bagi masyarakat dan bagi para akademisi dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan bidang muamalah khususnya.

2. Secara Praktis

Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat umumnya kepada masyarakat, dan di khususkan bagi pihak yang terlibat dalam hukum bisnis syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa, *rahn* berarti tertahan. Menurut istilah, kata *rahn* ialah memperlakukan harta sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam, supaya dianggap sebagai pembayaran manakala yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya. Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat *derma* sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Rahn juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua termasuk akad tabarru (*derma*) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*), (Rachmat Syafe'i, 2001:160).

Mengenai *al-marhun* (benda yang dijadikan sebagai jaminan utang) pada prinsipnya fuqaha sepakat bahwasanya setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjual-belikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang. (A. R. al-zajairy:296) sebagai mana dalam kaidah fiqih:

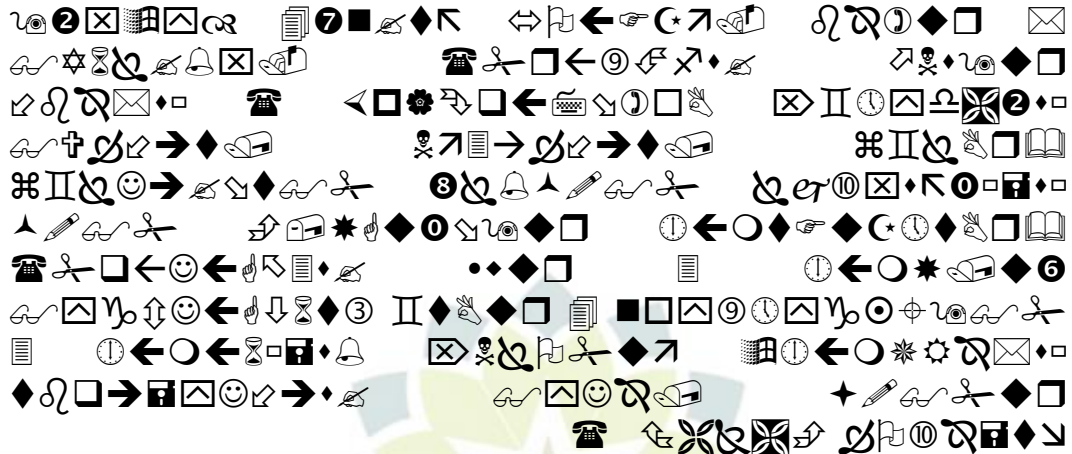
ما جاز بيعه جاز رهنه

“Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan”

Sudah barang tentu ada kekecualiannya, seperti manfaat barang boleh disewakan tapi tidak boleh digadaikan karena tidak bisa diserahkan terimakan. Menurut jumhur fuqaha akad *al-rahn* harus disertai penyerahan barang jaminan. Karena itu menurut mereka piutang dan harta bersama tidak sah dijadikan jaminan, kecuali ada persetujuan dari sekutunya. Fuqaha Syafi’iyah dan Hanabilah mempertegas persyaratan *al-marhun* harus berupa *a’in* (benda), tidak sah menjaminkan manfaatnya suatu benda.

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka disini juga telah berlaku riba (Hendi Suhendi, 2008:111).

Pandangan fuqaha tentang kebolehan akad gadai didasarkan pada keterangan Al-Qur'an dan Al- Hadis, Antara lain sebagai berikut:



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [jaminan] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 283). (R. H. A. Soenarjo, dkk, 1994: 38)

Dalil dari Hadits :

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من

حديث(رواه البخارى ومسلم)

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kaidah fiqih :

إذا ضاق الأمر إتسع وإذا اتسع الأمر ضاق

“Apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas maka hukumnya menjadi sempit”.

Kaidah ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Para ulama telah bersepakat bolehnya gadai ketika safar, dan jumbuh ulama membolehkannya juga ketika muqim. Demikian, berdasarkan dasar dari Al-Qur'an, As sunnah, dan ijma sepakat bahwa akad *rahn* diperbolehkan dalam islam, dengan dasar kemaslahatan dan manfaat yang terkandung didalamnya dalam rangka tolong menolong diantara sesama manusia.

Terdapat perbedaan yang mendasar Antara gadai (*rahn*) dalam fiqih muamalah dan gadai yang ada di Indonesia, yaitu pada imbalan jasa atau *prosentase* tertentu dari pokok utang. Utang-piutang dalam *rahn* pada prinsipnya tidak membawa resiko imbalan jasa. *Murtahin* tidak menerima keuntungan apa-apa dari pinjaman yang ia berikan. Imbalan jasa oleh para ulama dianggap riba, karena *rahn* dalam islam hanya merupakan sarana tolong menolong tanpa ada imbalan jasa yang harus diterima *murtahin*. Sedangkan dalam gadai, imbalan jasa harus dipenuhi oleh *rahin* (H. habib nazir, M. hasanuddin:547).

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadikan bukti pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya lebih baik menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah. Pihak yang berutang menjaga amanah

atas pelunasan utang, sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan. (Gufron A. Mas'adi, 2002:179)

Gadai sewa yang bertujuan untuk tolong menolong antar sesama manusia dapat menjadi hal yang menimbulkan kebathilan yang tidak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam fiqih muamalah. Menurut Juhaya S. Praja (2000: 113) asas-asas muamalah tersebut Antara lain:

1. Asas *Taba, dulul Mana'fi'*

Asas *taba, dulul mana'fi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak lain dalam masyarakat, dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu dibuat hukum zakat, shodaqoh, infaq, dsb. Selain itu islam juga menghalalkan bentuk-bentuk pemindahan kepemilikan harta dengan cara yang sah seperti jual beli, sewa menyewa dsb.

3. Asas suka sama suka atau *An-Taradhin*

Asas ini menyatakan bahwa segala jenis bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini

dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4. Asas '*Adamul Gharar*

Asas '*adamul gharar*' berarti bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas *Al-birri Wa Al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamlat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birri wa taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *Musyarokah*

Asas *musyarokah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan umat manusia. Asas ini melahirkan dua bentuk kepemilikan: *Pertama*, pemilik pribadi atau individu (milik adami), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. *Kedua*, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah SWT itu dikuasai oleh pemerintah seperti air, udara, kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya. (Juhaya S. Praja, 1995: 113-115)

Islam sangat memperhatikan kepada muslim demi menuntun kearah hidup yang bahagia didunia dan diakhirat, salah satunya dibidang muamalah (gadai sewa). Agar gadai sewa tidak menyimpang maka islam melarang gadai sewa yang merugikan salah satu pihak, hukumnya menjadi batal karena tidak ada keadilan didalam nya serta mengandung riba dan tidak sesuai dengan asas pemerataan dan asas '*Adamul Gharar* bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus menerapkan prinsip keadilan agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin serta tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihakdalam melakukan suatu transaksi ataupun perikatan. Oleh karena itu Allah berfirman sebagai berikut :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٧

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (R. H. A. Soenarjo, dkk, 1994: 436)

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi muamalah dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara

manusia, karena ini termasuk pemerataan agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang dan tidak ada tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi (gadai) atau transaksi (sewa). Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka diharapkan penulis dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas yaitu tentang pelaksanaan sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang sistematis dan prosedural dengan matang maka harus melalui beberapa tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. karena metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai satuan yang terintegrasi. Penelitian ini dilakukan secara mendalam pada data dalam suatu masalah dengan batasan terperinci, serta waktu dan tempat. Beberapa macam kasus yang diteliti berupa program, peristiwa, aktivitas, dan individu (Cik Hasan Bisri,1997:54).

Tujuan dari penelitian studi kasus ialah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti, individu, kelompok, lembaga atau komunitas.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh dari sumber data yang kompeten yaitu melalui dua sumber data diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu orang yang berkaitan langsung dan ikut memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan diantaranya:

- 1) Pemilik lahan pertanian yang digadaikan lalu disewa kembali di Desa Pinangsari.
- 2) Pemilik uang yang menggadai lalu menyewakannya kembali kepada pemilik lahan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Diantaranya kitab Bidayatul Mujtahid (ibnu Rusy), Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Wahbah Az-zuhaili), Fathul Mu'in (Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Ranni), Fiqih Sunnah (Sayyid Sabiq), tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan segala bentuk referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

- a. Data mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan Pelaksanaan Sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- b. Data mengenai pelaksanaan Sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- c. Data mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya & Tedi Priyatna observasi diartikan sebagai “teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung”. (2008:160).

Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati pelaksanaan sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan dengan mengumpulkan pandangan-pandangan para pihak mengenai kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution,1991:105) dilakukan dengan tehnik wawancara baku dan terjadwal dengan bentuk wawancara semi terstruktur. Dengan maksud untuk memberikan keleluasaan kepada responden untuk menerangkan sesuai pandangan responden pada saat wawancara berlangsung sebagai berikut:

- 1) Alasan pemilik lahan menggadaikan
- 2) Alasan pemilik uang menyewakan lahan yang digadaikan
- 3) Mengapa melakukan praktek sewa pada lahan pertanian yang digadaikan

c. Studi Kepustakaan/Dokumentasi

Studi pustaka yaitu pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian dari berbagai sumber dengan mengkaji berbagai literature tentang teori yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, maka data dan informasi yang diperlukan Antara lain berupa teori-teori hukum dan pendapat para ulama yang sesuai dengan masalah sewa-menyewa pada lahan pertanian yang digadaikan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang telah terkumpul baik data-data hasil wawancara antara penulis dengan pihak masyarakat yang terlibat, maupun data studi kepustakaan kemudian penulis menghubungkan data-data tersebut dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

- b. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis, dengan demikian hasil penelitian akan menghasilkan suatu karya berbentuk skripsi, yang dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

